

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penanganan tindak pidana kesusilaan berupa penawaran layanan seksual sesama jenis melalui Facebook di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum pidana terhadap penawaran layanan seksual siber di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, serta Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015. Implementasi penanganan oleh Polres Jember melalui penyelidikan dan penyidikan belum berjalan optimal akibat beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi penggunaan akun anonim oleh pelaku, sulitnya polisi menembus komunitas tertutup LGBT, keterbatasan teknologi digital forensik, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus asusila. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi moral dan patroli siber, serta represif melalui penegakan hukum sanksi pidana dan penyitaan barang bukti. Diharapkan kepolisian meningkatkan kapasitas siber dan pemerintah daerah memperkuat regulasi serta literasi digital masyarakat guna menekan maraknya kejahatan prostitusi online sesama jenis di Kabupaten Jember secara efektif.

Kata kunci. Facebook, Kabupaten Jember, Layanan Seksual Sesama Jenis, Tindak Pidana Kesusilaan

ABSTRAC

This study analyzes the handling of criminal acts against morality in the form of offering same-sex sexual services via Facebook in Jember Regency. The research method used is empirical law with a legal sociology and conceptual approach. The results of the study indicate that criminal law regulations regarding the offering of cyber sexual services in Indonesia are based on the ITE Law, the Pornography Law, and Jember Regency Regulation Number 8 of 2015. The implementation of handling by the Jember Police through investigations and inquiries has not been optimal due to several obstacles. These obstacles include the use of anonymous accounts by perpetrators, the difficulty of police in penetrating closed LGBT communities, limitations in digital forensic technology, and minimal active public participation in reporting immoral cases. Mitigation efforts are carried out preventively through moral socialization and cyber patrols, and repressively through law enforcement of criminal sanctions and confiscation of evidence. It is hoped that the police will increase cyber capacity and the local government will strengthen regulations and public digital literacy to effectively suppress the rampant crime of online same-sex prostitution in Jember Regency.

Keywords. Criminal Offenses Against Morality, Facebook, Jember Regency, Same-Sex Sexual Services